

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sampah merupakan sisa dari kegiatan sehari-hari manusia dan hasil proses dari alam seperti sampah dedaunan ranting pohon yang kering. Sampah mempunyai banyak jenis diantaranya ada sampah organik, anorganik, sampah B3, sampah kertas, dan sampah residu. Sampah sampai saat ini merupakan masalah yang sangat serius seperti masalah Kesehatan, masalah sosial, ekonomi dan budaya. Sampah. Oleh karena itu perlu adanya kesadaran manusia untuk mengatasi permasalahan sampah ini agar terciptanya lingkungan yang asri.

Pemerintah memiliki peranan penting dalam permasalahan sampah yang ada di Indonesia. Pemerintah memberikan kebijakan mengenai pengelolaan sampah dalam (UU No 18 Tahun 2008). Dalam undang-undang tersebut dijelaskan segala hal mengenai pengelolaan sampai dengan sanksi yang diberikan kepada individu atau entitas yang melanggar ketentuan undang-undang. Selain memberikan kebijakan pemerintah juga mempunyai kewajiban untuk mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya pengelolaan sampah dan dampak negatif yang ditimbulkan dari sampah apabila tidak dikelola dengan baik. Kemudian pemerintah juga harus bisa melakukan inovasi baru untuk mengatasi permasalahan sampah agar bisa lebih efisien dan efektif.

Sampah yang dibuang sembarangan dan tidak dikelola dengan baik dapat menyebabkan dampak negatif bagi lingkungan. Pencemaran udara, pencemaran

tanah, pencemaran air dan pencemaran ekosistem. Menurut data yang didapat dari World Bank yang berjudul What a Waste 2.0 (Tahun 2023) menyebutkan bahwa dunia menghasilkan 2,01 miliar ton sampah yang berasal dari perkotaan setiap tahunnya dan sebesar 33% sampah tidak terkelola dengan baik dan mengakibatkan kerusakan bagi lingkungan. Di Indonesia sendiri menurut KOMENKO PMK (Tahun 2022) total produksi sampah sebesar 65.71% (13,9 juta ton) yang terkelola, sedangkan 43,29% (7,2 juta ton) tidak terkelola dengan baik.

Indonesia merupakan salah satu negara yang mempunyai sungai terbanyak. Namun, masih banyak warga yang tinggal di daerah pinggiran sungai yang membuang sampah sembarangan tanpa memikirkan dampaknya. Pencemaran sungai bisa dipengaruhi oleh berbagai faktor dan salah satunya adalah ulah manusia yang tidak bertanggung jawab yang membuang sampah ke sungai. Masyarakat seringkali membuang sampah ke sungai yang mengakibatkan terhambatnya aliran sungai sampai terkadang menyebabkan terjadinya banjir. Selain dari banjir, tumpukan sampah yang berada di sungai juga memberikan pemandangan yang tidak layak dipandang dengan kondisi air yang keruh dan bercampur dengan tumpukan-tumpukan sampah dan juga menimbulkan bau yang tidak sedap. Tingginya pencemaran di sungai disebabkan oleh rendahnya kesadaran Masyarakat maupun industry yang terus menjadikan sungai sebagai tempat untuk membuang sampah maupun limbah. Namun di samping itu semua mungkin pemerintah juga kurang memberikan fasilitas yang memadai seperti menyediakan TPS di daerah pinggiran sungai agar masyarakatnya tidak lagi membuang sampah ke sungai. Berdasarkan data yang didapat dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2022

terdapat Sembilan sungai di Indonesia yang memenuhi kualitas baku mutu dari 110 sungai yang diidentifikasi. angka tersebut memperlihatkan betapa buruknya kualitas air sungai yang ada di Indonesia.

Di Kota Tasikmalaya sendiri sampah di sungai merupakan isu yang harus segera di selesaikan. Kota Tasikmalaya mempunyai dua sungai yaitu Ciwulan dan Citanduy. Kedua sungai tersebut berakhir di laut Pangandaran dan Jawa Tengah yang dimana daerah tersebut dikanal dengan pusat perikanan terbesar di Jawa. Dengan banyaknya sampah yang mencemari sungai tersebut dapat menimbulkan banyak dampak negatif. Sampah yang banyak ditemukan di sungai Ciwulan dan Citanduy kebanyakan adalah sampah plastik.

Menurut data yang di dapat dari artikel (jabarnews) pada tahun 2022 di sungai Ciwulan terdapat 180 partikel mikroplastik dalam 100 liter air yang terbagi menjadi dua yaitu jenis fiber 100 partikel, jenis filamen 60 partikel, dan fegmen atau cuilan plastik sebanyak 20 partikel. Kemudian selain itu, kondisi sungai Citanduy juga terdapat banyak sampah yang akan mengancam pencemaran air laut karena sungai tersebut bermuara ke laur Pangandaran.

Pengelolaan sampah di Kota Tasikmalaya merupakan salah satu faktor yang menyebabkan masyarakatnya banyak membuang sampah ke sungai. Pemerintah daerah harus bisa memberikan regulasi mengenai pengelolaan sampah agar menekan angka sampah yang ada di sungai. Permasalahan mengenai sampah yang ada di sungai merupakan isu yang sangat penting untuk diselesaikan oleh karena itu, hal ini harus menjadi fokus bagi pemerintah Kota Tasikmalaya.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan sebelumnya mengenai permasalahan sampah yang ada di sungai yang harus di perhatikan secara seksama oleh berbagai kalangan mulai dari Masyarakat sampai dengan pemerintah Kota Tasikmalaya yang harus bisa memberikan regulasi yang tetap untuk mengatasi permasalahan ini. Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “Analisis upaya penanggulangan dan pencegahan pencemaran Sungai akibat Sampah di Tasikmalaya” dengan menggunakan teori Kebijakan Pemerintahan.

B. Rumusan Masalah

Bagaimana intervensi pemerintah Kota Tasikmalaya dalam penanganan sampah di sungai Ciwulan dan Citanduy?

C. Tujuan penelitian

1. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui upaya apa yang akan dilakukan pemerintah Kota Tasikmalaya dalam mengatasi permasalahan sampah di sungai Ciwulan dan Citanduy.
2. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis kebijakan apa yang akan diterapkan untuk mengatasi permasalahan sungai oleh sampah di Kota Tasikmalaya.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan yang bisa digunakan sebagai rujukan penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat menjadi acuan untuk komunitas dan instansi.

E. Tinjauan Pustaka

Pertama, menurut Putra & Mandala, (2020) dengan judul Upaya Cepat Dalam Mengatasi Banjir Akibat Penumpukan Sampah di Sungai Saba Desa Pengastulan, Seririt. Hasil dari jurnal ini menunjukkan bagaimana pengelolaan sampah sangat penting yang dilakukan dalam upaya pencegahan penumpukan sampah karena dapat terciptanya kebersihan lingkungan sekitar.

Kedua, menurut Syahputra & Sariwaty, (2021) dengan judul Strategi Komunikasi Pemerintah dalam Penyebaran Informasi Pengelolaan Sampah Sungai Cidurian Selatan Kota Bandung. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah pemerintah memiliki peranan penting untuk berkomunikasi dalam penyebaran informasi mengenai pengelolaan sampah Sungai Cidurian Bandung. Media yang digunakan dalam strategi komunikasi ini adalah seperti surat formal, poster dan spanduk sebagai sarana informasinya.

Ketiga, menurut Diyanah et al., (2019) dengan judul Pendampingan Masyarakat Bantaran Sungai dalam Pendirian Bank Sampah untuk Meminimalisir Sampah Sungai di Pegirian Surabaya. Hasil dari penelitian ini adalah dari adanya kebiasaan Masyarakat kelurahan Pengirian yang membuang sampah ke bantaran sungai karena menurut kebanyakan orang itu sebagai akses terdekat untuk membuang sampah dan juga ketersediaan Tempat Pembuangan Sementara yang disediakan oleh pemerintah tidak mencukupi dengan banyaknya sampah di sana. Oleh karena itu Masyarakat Kelurahan Pengirian mendapatkan konsentrasi dari

pemerintah dengan mengadakannya bank sampah yang tujuannya menekan jumlah sampah yang ada. Kegiatan pendirian bank sampah dilakukan dengan cara melakukan koordinasi dan penggalan komitmen, sosialisasi dan uji coba, implementasi, monitoring dan evaluasi.

Keempat, menurut Huda et al., (2020) dengan judul Pengelolaan Sampah di Sepanjang Sempadan Sungai Kelurahan Pancor dan Kelurahan Sekarteja. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Dalam penelitian ini menjelaskan program pengelolaan sampah yang diinisiasi oleh pemerintah kelurahan yang termasuk pengelolaan dengan model sentralistik tanpa peran dari Masyarakat.

Kelima, menurut Putra & Mandala, (2020) dengan judul Upaya Cepat dalam Mengatasi Banjir Akibat Penumpukan Sampah di Sungai Saba Desa Pengastulan, Seririt. Metode yang digunakan adalah metode kuantitatif. Dalam penelitian ini banjir merupakan masalah utama yang dipengaruhi oleh tumpukan sampah yang berada di sungai Saba Desa Pengastulan Seririt. pencedaan tempat sampah di sekitaran desa dan mengandalkan partisipasi dan gagasan masyarakat sebagai salah satu bentuk pengelolaan sampah yang ada di sana.

Keenam, menurut Isthofiyani et al., (2016) dengan judul Persepsi Dan Pola Perilaku Masyarakat Bantaran Sungai Damar Dalam Membuang Sampah Di Sungai. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif desain studi kasus. Dalam penelitian ini upaya penanggulangan sampah sudah dilakukan seperti mengadakan program bank sampah, kemudian program tentang sosialisasi dan bersih-bersih desa oleh kepala dusun. Namun, permasalahan sampah belum bisa di selesaikan.

Oleh karena itu dalam penelitian ini melakukan pemberdayaan Masyarakat dalam menumbuhkan sikap peduli lingkungan agar Masyarakat bisa lebih peka terhadap isu lingkungan dan bisa menjalankan program yang tidak berjalan dengan baik sebelumnya.

Ketujuh, menurut Aulia & Triwahyudi, (2020) dengan judul Pelaksanaan Pengelolaan Sampah Plastik di Sungai Bengawan Solo oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta. Hasi dari penelitian ini pengelolaan sampah plastik yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta dengan cara melakukan konservasi sungai Bengawan Solo di wilayah Surakarta.

Kedelapan, menurut Arisandi et al., (2020) dengan judul Pengelolaan Sampah Plastik yang Mencemari Saluran Irigasi Sungai Tonjung Kabupaten Bangkalan Madura. Hasil dari penelitian ini pengelolaan sampah yang dilakukan pemerintah Kabupaten Bangkalan madura yang bermitra bersama masyarakat berhasil mengumpulkan sampah plastik di sungai dengan relatif besar yaitu 400 gr hingga 1000 gr per hari dan sampah berupa botol dan bungkus plastik didaur ulang menjadi pot hias dan tas cantik.

Kesembilan, menurut Susanti & Evanita, (2022) dengan judul Strategi Komunikasi Lingkungan pada Pengelolaan Sampah di Jorong Galuang Kecamatan Sungai Pua. Program pelayanan penyemputan sampah mitra mandiri di Nagari Sungai Pua yang dikelola oleh Bunmnag melakukan komunikasi massa dengan spanduk dan komunikasi personal dengan mengunjungi rumah masyarakat. Hasil dari kominikasi tersebut dinilai berpengaruh terhadap pengelolaan sampah yang dilihat dari sungai yang bersih dari sampah.

Kesepuluh, menurut dengan judul Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga di Wilayah Kerja Puskesmas Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020. Hasil dari penelitian ini mendapatkan puskesmas kandangan dapat meningkatkan Pendidikan Kesehatan dan membentuk bank sampah di tiap kelurahan.

Berdasarkan dari beberapa penelitian terdahulu, yang menjadi pembeda dalam penelitian yang akan ditulis oleh penulis adalah fokus dari permasalahan sampah di sungai Kota Tasikmalaya adalah upaya penanganan sampah yang berada di bantaran sungai dan upaya pencegahan yang dilakukan pemerintah daerah Kota Tasikmalaya dalam pengelolaan sampah di sungai.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah mengenai kendala dan permasalahan yang ada di sungai Kota Tasikmalaya yang merupakan peran pemerintah daerah dalam mengatasi masalah ini. Kemudian pada penelitian sebelumnya belum ada yang melakukan penelitian mengenai upaya penanganan dan penanggulangan sampah di sungai Kota Tasikmalaya

F. Kerangka Teori

1. Kebijakan

Kebijakan adalah serangkaian aturan, prinsip, panduan atau Tindakan yang ditetapkan oleh suatu entitas, seperti pemerintah, organisasi, atau individu. Adanya kebijakan adalah untuk mengatur perilaku, mengambil keputusan atau tujuan tertentu. Kebijakan mencakup banyak hal seperti politik, ekonomi, lingkungan, Pendidikan dan banyak lagi. Tujuan dari kebijakan itu sendiri

adalah untuk menciptakan kerangka kerja yang dapat membantu mencapai tujuan yang diinginkan atau memecahkan masalah tertentu.

Kebijakan secara etimologi berasal dari Bahasa Yunani yaitu “*polis*” artinya kota yang dalam hal ini kebijakan berkenaan dengan gagasan pengaturan organisasi dengan pola formal yang sama-sama diterima oleh pemerintah sehingga bisa mencapai tujuannya (Borrego, 2021).

Kebijakan dibuat sebagai pedoman dalam bertindak, memberi arahan dalam organisasi untuk mencatat tujuan yang ditetapkan. Intinya, kebijakan merupakan landasan umum untuk bertindak untuk semua jenjang organisasi.

2. Kebijakan Publik

Menurut Andi Cudai Nur dan Muhammad Guntur (2017) kebijakan publik dapat artikan sebagai hubungan antara suatu pemerintah dengan lingkungannya. Kebijakan publik juga merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang telah ditetapkan oleh seorang aktor maupun sejumlah aktor dalam mengatasi suatu permasalahan.

Menurut Desrinelti et al., (2021) kebijakan publik lahir dari adanya kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Pembuat kebijakan kebijakan publik biasa disebut dengan stakeholder.

Menurut L. D. M. Putri & Mutiarin, (2018) kebijakan publik adalah sebuah peningkatan kualitas dari pelayanan publik.

Dari beberapa pengertian mengenai kebijakan publik di atas terdapat beberapa contoh yaitu kebijakan publik yang bersifat makro atau mendasar seperti UUD 1945, perpu, peraturan pemerintah, peraturan presiden dan

peraturan daerah. Kemudian contoh dari kebijakan publik berikutnya yang ada di Indonesia adalah kebijakan untuk mengatasi pandemic dari Kementerian Keuangan RI yaitu adanya dana untuk belanja penanganan Kesehatan sebesar Rp.65,8 triliun.

3. Kebijakan Lingkungan

Kebijakan lingkungan merupakan peraturan, strategi, Tindakan maupun pedoman yang diimplementasikan oleh pemerintah, organisasi, atau individu untuk melindungi dan mengelola lingkungan, sumber daya alam, dan juga meminimalisasi dampak negatif manusia terhadap ekosistem. Menurut (P. Putri et al., 2021) Kebijakan lingkungan merupakan Tindakan yang meliputi pembatasan terhadap aktivitas pencemaran lingkungan yang dilakukan secara langsung, dan memberikan teknis tertentu mengenai pengelolaan lingkungan.

Kebijakan lingkungan adalah serangkaian pernyataan atau tindakan yang ditetapkan oleh pemerintah, organisasi, atau individu untuk mengatur dan mengelola pengaruh manusia terhadap lingkungan alam. Tujuan dari kebijakan lingkungan adalah untuk melindungi dan melestarikan sumber daya alam, ekosistem, serta kualitas udara, air, dan tanah, sambil mengurangi dampak negatif aktivitas manusia terhadap lingkungan.

Kebijakan lingkungan dapat mencakup bagian aspek seperti:

- a. Perlindungan sumber daya alam: Kebijakan ini berfokus pada pengelolaan sumber daya alam seperti hutan, lahan, air, dan energi untuk memastikan penggunaan yang berkelanjutan.

- b. Pengendalian polusi: Kebijakan lingkungan dapat mengatur emisi polutan seperti gas rumah kaca, limbah industri, dan limbah domestik untuk mengurangi dampak negatifnya pada lingkungan dan kesehatan manusia.
- c. Pelestarian biodiversitas: Kebijakan ini bertujuan untuk melindungi beragam spesies dan ekosistem di seluruh dunia agar tidak punah.
- d. Pengelolaan limbah: Kebijakan ini berkaitan dengan pengurangan, daur ulang, dan pengelolaan limbah agar tidak merusak lingkungan.
- e. Konservasi energi: Upaya untuk mengurangi konsumsi energi dan mendorong penggunaan sumber energi yang lebih bersih dan berkelanjutan.
- f. Pengelolaan Lahan dan Tata Guna Lahan: Kebijakan ini mengatur tata guna lahan, penggunaan lahan perkotaan, pengelolaan hutan, dan perlindungan wilayah-wilayah alam yang sensitif.
- g. Kebijakan Perubahan Iklim: Ini mencakup upaya untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan menghadapi perubahan iklim yang sedang terjadi. Kebijakan ini sering melibatkan target-target pengurangan emisi dan upaya adaptasi.
- h. Keuangan Lingkungan: Kebijakan ini berfokus pada alokasi dana dan sumber daya ke proyek-proyek lingkungan, termasuk insentif keuangan untuk proyek-proyek berkelanjutan.

- i. Pendidikan dan Kesadaran Lingkungan: Kebijakan ini mendukung program-program pendidikan dan kampanye kesadaran lingkungan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang isu-isu lingkungan dan mengubah perilaku mereka.

Kebijakan lingkungan dapat diimplementasikan melalui undang-undang, peraturan, insentif, dan kampanye pendidikan. Tujuannya adalah untuk mencapai keseimbangan antara kepentingan lingkungan alam dan kebutuhan manusia, serta memastikan bahwa kita dapat menjaga keberlanjutan lingkungan bagi generasi mendatang.

Salah satu contoh yang bisa dalam kebijakan lingkungan adalah mengenai sampah. Sampah yang merupakan permasalahan yang sangat penting karena mengganggu kenyamanan lingkungan dan masyarakat. Harus ada kebijakan yang mengatur tentang pengelolaan dan pencegahan dari penumpukan sampah seperti yang banyak ditemui adalah sampah yang berada di pinggir sungai yang sangat mengganggu. Oleh karena itu terdapat beberapa contoh kebijakan lingkungan mengenai adanya banyak sampah di sungai dengan cara memberikan papan larangan membuang sampah dan tulisan pemberian sanksi pidana dan denda di dalamnya, memberikan sanksi sosial, mengadakan bank sampah untuk mengurangi penumpukan sampah, memberikan tempat pembuangan sampah kolektif, dan juga memberikan sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya kebersihan lingkungan dan dampak dari membuang sampah sembarangan.

4. Jenis-Jenis Kebijakan

Menurut Suharno, kategori kebijakan publik dibagi menjadi tiga yaitu (Novitasari, 2021):

a. Kebijakan Regulatif

Merupakan kebijakan yang bertujuan untuk mengatur perilaku masyarakat atau perusahaan agar sesuai dengan tujuan yang diinginkan oleh pemerintah. Kebijakan regulatif biasanya bersifat protektif atau mengatur. Dalam (Atmaja, 2013) kebijakan regulatif merupakan kebijakan tentang pembatasan atau larangan terhadap seseorang atau sekelompok orang. Kemudian dalam (Sadhana, 2011) menyatakan bahwa kebijakan regulatif merupakan kebijakan yang bersifat mengatur dan membatasi.

Contoh dari kebijakan regulatif diantaranya adalah regulasi keuangan, regulasi lingkungan, regulasi industri, regulasi telekomunikasi, regulasi Kesehatan dan keselamatan kerja, regulasi farmasi, regulasi pangan, regulasi perdagangan dan tarif, regulasi monopoli dan persaingan, dan regulasi transportasi.

b. Kebijakan Distributif

Kebijakan yang mengatur tentang pemberian pelayanan/keuntungan kepada individu, kelompok, atau perusahaan. Menurut Abidin dalam (Astuti, 2016) kebijakan distributif merupakan kebijakan yang bermula pada tindakan pemerintah untuk membantu golongan ekonomi lemah yang umumnya yang kebanyakan tidak dapat memanfaatkan fasilitas yang telah

disediakan untuk umum, kebijakan ini bertujuan untuk menyeimbangkan berbagai kesenjangan antar golongan.

Contoh dari kebijakan distributif diantaranya adalah: Program bantuan sosial, kebijakan pajak progresif, subsidi bahan bakar dan energi, program Pendidikan gratis atau terjangkau, kebijakan Kesehatan universal, regulasi ketenagakerjaan, program rehabilitas lingkungan, dan dana investasi sosial.

c. Kebijakan Redistributif

Kebijakan yang mengatur pemindahan alokasi kekayaan, pemilikan, atau hak-hak. Kebijakan ini melibatkan penggunaan dana public untuk mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi antara kelompok masyarakat. Dalam (Lukman & Hakim, 2015) kebijakan redistributif adalah usaha yang dilakukan pemerintah untuk memindahkan alokasi dana dari kekayaan pendapatan, pemilihan atau hak-hak di antara kelompok-kelompok penduduk. Yang termasuk dalam kebijakan ini adalah pengelompokan pajak pendapatan, pemberantasan masalah kemiskinan, Kesehatan dan lain-lain.

Contoh dari kebijakan redistributif di antaranya adalah pajak penghasilan progresif, program bantuan kesejahteraan, program Kesehatan publik gratis, dana pensiun dan jaminan sosial, pemotongan pajak untuk pekerjaan rendah pendapatan, program investasi infrastruktur di daerah terpinggirkan, dan program bantuan pendidikan.

5. Pengelolaan Sampah

Menurut (Muliadi et al., 2022) sampah merupakan buangan yang dihasilkan dari proses produksi baik industri maupun domestik (rumah tangga). Dalam UU No 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, sampah merupakan sisa kegiatan sehari-hari atau proses alam yang berbentuk padat atau semi padat, berupa zat organik maupun non organik yang dapat terurai.

Menurut (Dewanti et al., 2020) pengelolaan sampah merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menanggulangi sampah mulai dari saat ditimbulkan sampai dengan akhir. Adanya pengelolaan sampah ditujukan untuk mengurangi dampak negatif lingkungan dan kesehatan manusia yang disebabkan oleh penumpukan sampah.

Dalam UU No 18 Tahun 2008 terdapat Sembilan pokok pengelolaan sampah yaitu diantaranya penyelenggaraan pengelolaan sampah, pelaksanaan prinsip 3R dan EPR (Extended Producers Responsibility), pembagian kewenangan, partisipasi Masyarakat, partisipasi dunia usaha, pembiayaan, intensif-disinsentif, dan larangan.

Pemerintah memiliki tanggung jawab dalam rangka pengelolaan sampah yang dimana diharapkan dapat mencapai beberapa hasil dan manfaat yang penting bagi lingkungan, masyarakat, kesehatan umum. Kemudian selain pemerintah masyarakat juga memiliki peranan yang cukup penting dalam pengelolaan sampah. Karena masyarakat merupakan salah satu bagian untuk terciptanya lingkungan yang bersih. Dengan aktifnya partisipasi masyarakat

dan pengelolaan sampah yang baik dari pemerintah diharapkan dapat memberikan dampak positif manusia dan untuk lingkungan.

G. Definisi Konseptual

Definisi konseptual dari penelitian ini menggambarkan secara jelas terkait permasalahan yang akan diteliti. Konsep penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan suatu tindakan yang diambil oleh pemerintah untuk memecahkan masalah publik dalam berbagai aspek dalam kehidupan masyarakat. Kebijakan publik dapat berupa undang-undang, peraturan, keputusan, program, atau tindakan lainnya yang diambil oleh pemerintah. Pada penelitian ini penulis menggunakan teori dari Suharno (2008) yang membagi kebijakan publik menjadi tiga yaitu kebijakan regulatif, kebijakan distributif, dan kebijakan redistributif.

2. Jenis-Jenis Kebijakan Lingkungan

Jenis-jenis kebijakan diantaranya sebagai berikut:

a. Kebijakan Regulatif

Kebijakan regulatif adalah jenis kebijakan pemerintah yang dirancang untuk mengatur, mengendalikan, dan mengawasi perilaku dan kegiatan entitas ekonomi, sosial, atau lingkungan dalam masyarakat.

b. Kebijakan Distributif

Kebijakan distributif adalah jenis kebijakan ekonomi dan sosial yang bertujuan untuk membagi secara adil sumber daya, pendapatan, atau manfaat ekonomi kepada berbagai kelompok masyarakat.

c. Kebijakan Redistributif

Kebijakan redistributif adalah jenis kebijakan ekonomi dan sosial yang dirancang untuk mengubah distribusi pendapatan, kekayaan, atau sumber daya ekonomi dalam masyarakat dengan cara yang lebih merata.

3. Kebijakan Lingkungan

Kebijakan lingkungan adalah tanggung jawab dari badan seperti pemerintah atau organisasi lainnya terhadap peraturan yang berkaitan dengan masalah lingkungan. Kebijakan lingkungan meliputi berbagai masalah seperti pencemaran udara, dan air, pengelolaan limbah dan ekosistem, pemeliharaan keanekaragaman hayati, pengelolaan sumber daya alam, satwa liar dan lainnya. Adanya kebijakan lingkungan adalah untuk mempengaruhi kegiatan manusia dan mencegah efek yang tidak diinginkan pada lingkungan dan berdampak pada manusia itu sendiri.

H. Definisi Operasional

Dalam penelitian ini, definisi operasional digunakan untuk menjelaskan variabel atau konsep yang diamati dalam sebuah penelitian dengan cara menguraikan variabel agar penulis memberikan Batasan-batasan dengan tujuan menjawab masalah dalam penelitian.

Tabel 1 Definisi Operasional

Variabel	Indikator
Regulatif	Peraturan Pemerintah daerah mengenai sampah di sungai
Distributif	Program pembersihan sampah sungai
Redistributif	Pengalokasian kembali sumberdaya terkait program dan kebijakan

I. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan situasi sosial yang akan diteliti. Penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data hasil pengamatan, wawancara, pemotretan atau analisis dokumen.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan data kualitatif yang menggambarkan mengenai masalah yang diteliti. Jenis data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang didapat dari Dinas Lingkungan dan masyarakat melalui wawancara dan dokumentasi. Peran dari penelitian kualitatif untuk peneliti adalah sebagai instrumen dalam mengumpulkan data dan menafsirkan data melalui pengamatan secara langsung, wawancara dan dokumentasi.

Penelitian deskriptif adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan atau mengidentifikasi karakteristik, sifat, atau kondisi suatu fenomena tanpa melakukan manipulasi atau pengaruh terhadap fenomena tersebut. Penelitian deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran yang akurat tentang sesuatu yang sedang diteliti. Dalam (Sari et al., 2023) penelitian deskriptif berfokus pada keadaan, tujuan penelitian yang menjelaskan mengapa segala sesuatu bisa seperti itu.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di tempat yang dipilih oleh penulis untuk menyelesaikan penelitiannya. Penelitian ini berlokasi di Bantaran sungai Ciwulan dan Citanduy Kota Tasikmalaya dan di Dinas Lingkungan Hidup Kota Tasikmalaya, Jalan Noenoeng Tisnasapoetra No.5 Sindanggalih Kahuripan Tawang Kota Tasikmalaya.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merujuk pada data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti dari sumber asli. Data ini diperoleh melalui penelitian atau survei yang direncanakan dan dilakukan secara langsung oleh peneliti atau tim penelitian. Data primer dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang spesifik dan biasanya disesuaikan dengan tujuan penelitian tertentu. Data penelitian ini berasal dari hasil wawancara Dinas Lingkungan Hidup Kota Tasikmalaya dan masyarakat setempat. Dilakukannya pengambilan data karena masalah ini merupakan keresahan

peneliti terhadap menumpuknya sampah di sungai Ciwulan dan Citanduy yang ada di Kota Tasikmalaya.

b. Data Sekunder

Data sekunder merujuk pada data yang telah dikumpulkan oleh orang atau entitas lain sebelumnya, dan data ini digunakan kembali atau dianalisis ulang oleh peneliti untuk tujuan tertentu. Data sekunder tidak dikumpulkan secara langsung oleh peneliti, tetapi diambil dari sumber yang sudah ada. Data sekunder dapat berasal dari berbagai sumber, seperti publikasi ilmiah, laporan pemerintah, basis data, literatur, dan sumber lainnya. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah jurnal mengenai pengelolaan sampah sungai dan berita terkait permasalahan sampah sungai yang berada di Kota Tasikmalaya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan metode untuk mengumpulkan sumber daya yang akan dilakukan oleh peneliti. Pengumpulan data dalam penelitian ini melalui:

a. Observasi

Observasi merupakan penelitian yang melibatkan pengamatan secara langsung terhadap objek atau fenomena untuk mengumpulkan data dan informasi yang akan dilakukan dalam jangka waktu kurang lebih satu bulan. Dalam jurnal (Wicaksana & Rachman, 2019) observasi adalah pengamatan secara langsung atau masih dalam tahap mengkaji objek dengan pengindraan

b. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan antara dua orang yang bertukar informasi melalui tanya jawab. Dalam penelitian ini peneliti akan mewawancarai narasumber untuk mengetahui informasi mengenai permasalahan yang akan diteliti seperti Ketua Dinas Lingkungan hidup sebagai orang pertama yang memiliki tanggung jawab mengenai permasalahan sampah, kemudian kepala bidang pengelolaan sampah sebagai orang yang lebih berfokus pada bidang persampahan, kemudian penggiat lingkungan hidup sebagai kelompok yang memiliki keresahan mengenai permasalahan lingkungan, dan Ketua RT/RW yang berada di daerah bantaran sungai sebagai perwakilan dari masyarakat dalam permasalahan ini. Wawancara berkaitan dengan pesan verbal dan non verbal dan tambahan yang ditemui oleh peneliti (Sitti Nuralan et al., 2022).

Tabel 2 Narasumber

No	Narasumber	Jabatan
1	Dinas Lingkungan Hidup Kota Tasikmalaya	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Tasikmalaya
2	Dinas Sumber Daya Air	Kepala UPTD PSDA WS Ciwulan Kota Tasikmalaya

3	Dinas Sumber Daya Air	Kepala UPTD PSDA WS Citanduy Kota Tasikmalaya
4	Aktivis Lingkungan	Ketua Penggerak Lingkungan Hidup
5	Masyarakat	Masyarakat sekitar bantaran sungai
6	Masyarakat	Masyarakat sekitar bantaran sungai

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah proses pengumpulan, penyimpanan, dan pengarsipan informasi atau rekaman tertulis, visual, atau audio. Dokumen adalah catatan tertulis, gambar, rekaman suara, atau media lain yang digunakan untuk mencatat fakta, informasi, peristiwa, atau data dalam berbagai konteks. Dokumentasi sering digunakan untuk menjaga catatan, berbagi informasi, mengorganisir data, dan menyediakan referensi yang dapat digunakan di masa depan. Menurut (Tanjung et al., 2022) dokumentasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data atau catatan tertulis yang ada.

5. Teknik Analisis Data

a. Analisis Data

Dalam penelitian ini informasi yang diperoleh dari hasil data wawancara Dinas Lingkungan Hidup Kota Tasikmalaya dan masyarakat

sekitar bantaran sungai Ciwulan dan Citanduy digabungkan meringkas informasi-informasi penting agar mampu mengambil kesimpulan dari data tersebut.

b. Penyajian Data

Penyajian data bertujuan untuk memudahkan penulis untuk merangkai temuan dalam hasil penelitian agar lebih mudah memahami apa yang terjadi. Penyajian data membantu peneliti untuk memahami dan mengambil keputusan berdasarkan data yang telah tersedia sehingga dapat ditarik kesimpulan.

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan tahap terakhir dalam penelitian untuk mencari makna data yang sudah dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan atau perbedaan. Pada tahap ini penulis menyimpulkan dari data yang telah dianalisis memverifikasi kesimpulan tersebut.